DAFTAR ISI

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria — 1

Penjelasan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria — 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah — 51

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah — 64

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar — 79

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah — 89

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah — 127

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat — 155

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan — 161

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional — 165

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional — 177

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN pada Badan Pertanahan Nasional — 201

Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran ($HSBK_u$) — 204

Harga Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A ($HSBK_{pa}$) Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah ($HSBK_{pp}$) Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah Secara Massal ($HSBK_{pm}$) — 206

Harga Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B ($HSBK_{pb}$) — 208

Pokok-pokok Aturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) — 211

Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah — 223